

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI
INDONESIA

Afinsha Sekar Cahyaningtyas

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

e-mail : afinsha22001@mail.unpad.ac.id**Abstract**

Poverty remains one of the major challenges in Indonesia's economic development because it is closely related to public welfare and labor market conditions. This study aims to analyze the effect of the Provincial Minimum Wage (UMP) policy on poverty using the Kaitz Index as a proxy for the degree of minimum wage policy bindingness. The study also examines the effects of informal employment and the interaction between the Kaitz Index and informal employment on poverty. The data consist of panel data from 34 provinces in Indonesia covering the period 2017-2025, obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The poverty rate is used as the dependent variable, while the Kaitz Index, informal employment, and their interaction are the main independent variables. The Open Unemployment Rate (TPT), real GRDP per capita, and a COVID-19 pandemic dummy variable are included as control variables. The analysis employs a Fixed Effects Model (FEM) with cluster-robust standard errors at the provincial level. The results show that the Kaitz Index has a negative and significant effect on poverty, while informal employment has a positive and significant effect. The interaction between the Kaitz Index and informal employment has a negative and significant effect on poverty. The Open Unemployment Rate has a positive and significant effect, whereas real GRDP per capita has a negative and significant effect. The COVID-19 pandemic dummy also shows a negative and significant effect. These findings provide empirical evidence on the relationship between minimum wage policy, labor market characteristics, and poverty in Indonesia.

Keywords: Provincial Minimum Wage, Kaitz Index, informal employment, poverty, panel data, Fixed Effects Model.

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kondisi pasar tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat kemiskinan dengan menggunakan *Kaitz Index* sebagai proksi tingkat keterikatan (*bindingness*) kebijakan upah minimum. Penelitian ini juga menguji pengaruh tingkat pekerja informal serta interaksi antara *Kaitz Index* dan pekerja informal terhadap kemiskinan. Data yang digunakan berupa data panel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017-2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan *Kaitz Index*, tingkat pekerja informal, dan interaksi keduanya menjadi variabel independen utama. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), PDRB riil per kapita, dan *dummy* pandemi COVID-19 digunakan sebagai variabel kontrol. Analisis

Article history

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

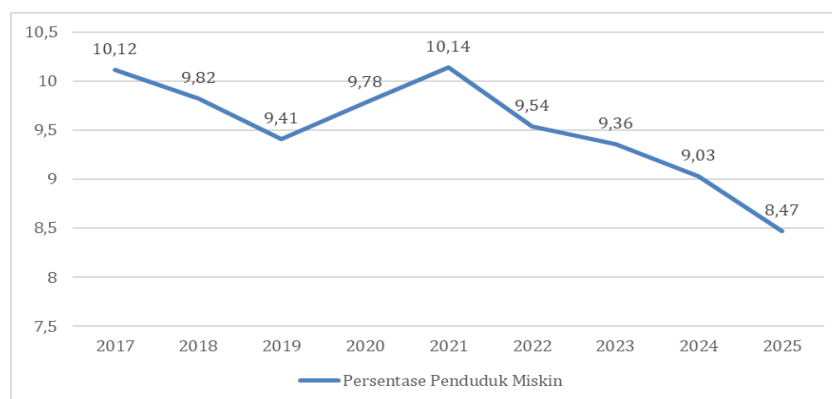
dilakukan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *cluster-robust standard errors* pada tingkat provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Kaitz Index* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pekerja informal berpengaruh positif dan signifikan. Interaksi *Kaitz Index* dan pekerja informal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. TPT berpengaruh positif dan signifikan, sementara PDRB riil per kapita berpengaruh negatif dan signifikan. *Dummy* pandemi COVID-19 juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Hasil penelitian memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan kebijakan upah minimum, karakteristik pasar tenaga kerja, dan kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: Upah Minimum Provinsi, *Kaitz Index*, pekerja informal, kemiskinan, data panel, *Fixed Effect Model*.

1. Pendahuluan

Kemiskinan sejak lama sudah menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional. Kemiskinan menggambarkan kondisi ketika individu maupun rumah tangga belum mampu memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mencapai taraf hidup yang layak, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang layak (Todaro & Smith, 2011). Secara global, tingkat kemiskinan ekstrem di dunia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa dekade terakhir, namun laju penurunan tersebut melambat dalam satu dekade terakhir (World Bank, 2025).

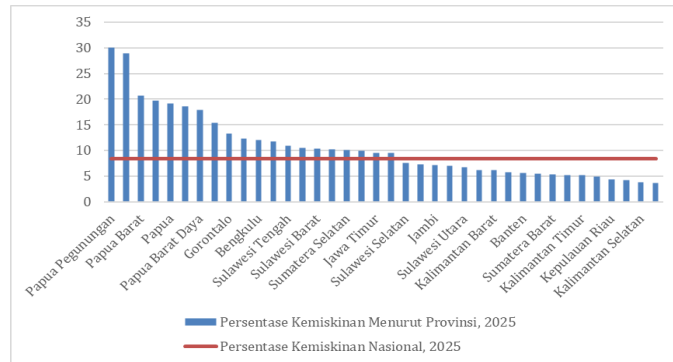
Hal tersebut juga tercermin dalam kondisi kemiskinan di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup konsisten, penduduk miskin menurun dari 10,64 persen pada Maret 2017 menjadi 8,47 persen pada Maret 2025. Meskipun demikian, tren penurunan tersebut sempat terhenti akibat adanya Pandemi COVID-19, dimana persentase penduduk miskin meningkat dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan mencapai puncaknya sebesar 10,19 persen pada September 2020, seiring dengan kontraksi ekonomi yang terjadi akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Setelah itu, tingkat kemiskinan mulai menurun kembali menjadi 9,71 persen pada September 2021 dan terus mengalami penurunan hingga periode pemulihan ekonomi berikutnya, sebagaimana terlampir dalam Grafik 1.1



Grafik 1.1 Tren Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah penulis

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat diamati bahwa meskipun tingkat kemiskinan Indonesia cenderung menurun dalam jangka panjang, pergerakannya masih sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi. Meskipun demikian, penurunan angka kemiskinan nasional yang disajikan pada Grafik 1.1 belum menunjukkan bahwa seluruh wilayah di Indonesia mengalami perkembangan atau kondisi yang serupa. Jika dilihat lebih mendalam, pada tingkat provinsi, tingkat kemiskinan memperlihatkan variasi nilai yang cukup tinggi.



Grafik 1. 2 Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi pada Tahun 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah penulis

Pada Grafik 1.2, dapat terlihat bahwa terdapat variasi tingkat kemiskinan yang sangat besar antarprovinsi, terdapat 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas angka nasional sebesar 8,47 persen, sedangkan 18 provinsi lainnya berada di bawah angka tersebut. Pada tahun 2025, Provinsi Bali mencatat tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,72 persen, sedangkan Papua Pegunungan mencatat tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 30,03 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pendapatan masih bervariasi antarprovinsi. Kemiskinan terjadi ketika pendapatan atau pengeluaran rumah tangga berada di bawah tingkat minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kondisi pasar tenaga kerja, termasuk kesempatan kerja, pengangguran, dan tingkat upah, dapat memengaruhi kesejahteraan rumah tangga (Watson, 2014; Fields, 2012). Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai batas bawah upah sektor formal yang cenderung meningkat setiap tahun. Namun, kenaikan UMP masih menimbulkan perbedaan pandangan antara pekerja yang mengharapkan peningkatan daya beli dan pelaku usaha yang mempertimbangkan kenaikan biaya produksi serta penyerapan tenaga kerja, sehingga efektivitas UMP dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan masih perlu dikaji.

Berdasarkan sumber data BPS menunjukkan bahwa rata-rata UMP Indonesia Tahun 2017-2025, selama hampir satu dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun dengan laju kenaikan yang bervariasi antarperiode. Peningkatan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja di tengah perubahan kondisi ekonomi.

Perbedaan kondisi ekonomi antarprovinsi menunjukkan bahwa kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pendapatan masih bervariasi. Kemiskinan terjadi ketika pendapatan atau pengeluaran rumah tangga berada di bawah tingkat minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, air bersih dan sanitasi, pendidikan, serta kesehatan (Watson, 2014). Bagi sebagian besar rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah, pekerjaan merupakan sumber utama pendapatan. Oleh

karena itu, perubahan kondisi pasar tenaga kerja, seperti kesempatan kerja, tingkat pengangguran, dan tingkat upah, dapat memengaruhi kesejahteraan rumah tangga serta risiko seseorang untuk jatuh ke dalam kemiskinan (Fields, 2012). Kondisi tersebut menjadikan kebijakan pasar tenaga kerja sebagai salah satu instrumen yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai batas bawah upah bagi pekerja sektor formal. Kebijakan UMP diharapkan mampu menjaga daya beli dan meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah. Namun, penetapan UMP setiap tahun juga menimbulkan perbedaan pandangan. Pekerja cenderung memandang kenaikan UMP sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pelaku usaha mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya produksi dan penyerapan tenaga kerja. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan nominal UMP belum tentu menghasilkan dampak yang sama terhadap kesejahteraan dan kemiskinan di setiap daerah.

Selain itu, formula penghitungan UMP mengalami beberapa kali perubahan selama periode 2017-2025. Pada 2017, penetapan UMP mengacu pada PP No. 78 Tahun 2015 dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan PDB nasional. Pada 2018-2020, formula nasional diterapkan secara lebih seragam, sedangkan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 36 Tahun 2021, penetapan UMP mulai mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah. Formula tersebut kemudian disempurnakan melalui PP No. 51 Tahun 2023 dengan penambahan koefisien penyesuaian pertumbuhan ekonomi daerah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan UMP tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja, tetapi juga oleh perubahan arah kebijakan pengupahan pemerintah.

Meskipun nominal UMP mengalami peningkatan, efektivitas kebijakan tersebut tidak selalu sama antarprovinsi. Setiap daerah memiliki tingkat upah, produktivitas, biaya hidup, dan struktur pasar tenaga kerja yang berbeda. Oleh karena itu, nilai UMP secara nominal belum sepenuhnya menggambarkan seberapa besar kebijakan tersebut memengaruhi pekerja di suatu wilayah. Efektivitas kebijakan UMP juga bergantung pada posisi UMP relatif terhadap tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja atau tingkat keterikatan (*bindingness*) kebijakan terhadap struktur upah di masing-masing daerah.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara upah minimum dan kemiskinan juga masih menunjukkan temuan yang beragam. Saget (2001) menemukan bahwa ukuran relatif upah minimum terhadap rata-rata upah berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan di berbagai negara berkembang. Godoey dan Reich (2021) juga menunjukkan bahwa dampak kenaikan upah minimum terhadap penurunan kemiskinan lebih besar pada wilayah dengan tingkat upah yang relatif rendah. Namun, Neumark dan Wascher (2007) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat memberikan manfaat bagi sebagian rumah tangga, tetapi pada saat yang sama berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi kelompok lainnya. Dalam konteks Indonesia, Bird dan Manning (2008) menyatakan bahwa kebijakan upah minimum memiliki keterbatasan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan karena sebagian besar rumah tangga miskin bekerja di sektor informal yang tidak secara langsung tercakup dalam regulasi upah minimum.

Karakteristik pasar tenaga kerja menjadi semakin penting karena Indonesia masih memiliki proporsi pekerja informal yang relatif besar. Pekerja informal tidak berada dalam cakupan langsung regulasi upah minimum sehingga kenaikan UMP belum tentu memberikan manfaat yang sama kepada seluruh kelompok pekerja. Comola dan De Mello (2011) menunjukkan bahwa peningkatan rasio upah minimum terhadap rata-rata upah dapat memengaruhi struktur pasar tenaga kerja melalui perubahan proporsi pekerja formal dan

informal. Sementara itu, Hohberg dan Lay (2015) menemukan bahwa kenaikan upah minimum meningkatkan upah pekerja formal, tetapi tidak memberikan *spillover effect* terhadap pekerja informal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat informalitas dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan upah minimum dalam menurunkan kemiskinan.

Hubungan antara upah minimum dan kemiskinan juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja secara umum. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat memengaruhi kemiskinan karena pengangguran kehilangan sumber pendapatan dari pekerjaan. Namun, hubungan tersebut dalam konteks Indonesia tidak selalu bersifat linear karena sebagian masyarakat yang tidak terserap di sektor formal masih dapat memperoleh pendapatan melalui pekerjaan informal. Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencerminkan kapasitas ekonomi daerah. Daerah dengan aktivitas ekonomi dan produktivitas yang lebih tinggi pada umumnya memiliki peluang penciptaan lapangan kerja dan pendapatan yang lebih besar, sehingga kondisi ekonomi daerah perlu dipertimbangkan dalam menganalisis hubungan antara kebijakan upah minimum dan kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh guncangan ekonomi eksternal, salah satunya pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan pembatasan aktivitas ekonomi dan berdampak terhadap pendapatan rumah tangga, terutama kelompok yang bergantung pada sektor-sektor yang terdampak pembatasan. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional meningkat pada 2020, sementara dampak pandemi terhadap perekonomian dan pasar tenaga kerja berlangsung secara bertahap hingga periode pemulihan. Oleh karena itu, kondisi pandemi perlu dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan ketika menganalisis hubungan antara kebijakan upah minimum dan kemiskinan antarprovinsi.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antara kebijakan upah minimum dan tingkat kemiskinan masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Perbedaan hasil penelitian dapat berkaitan dengan karakteristik pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi daerah, serta pendekatan yang digunakan untuk mengukur kebijakan upah minimum. Sebagian penelitian masih menggunakan nilai upah minimum secara nominal atau riil, sedangkan penggunaan ukuran relatif yang mencerminkan tingkat keterikatan (*bindingness*) kebijakan terhadap struktur upah, yaitu Kaitz Index, masih relatif terbatas dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan Kaitz Index sebagai ukuran tingkat keterikatan kebijakan upah minimum, serta mempertimbangkan tingkat informalitas tenaga kerja, TPT, PDRB per kapita, dan kondisi pandemi COVID-19 sebagai bagian dari model analisis.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Kemiskinan

Todaro dan Smith (2011) menjelaskan bahwa kemiskinan menggambarkan kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga tidak mampu mencapai standar hidup yang layak. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar tersebut berpotensi memperkuat antar dampak dari kemiskinan.

2.2 Konsep Upah Minimum

Upah merupakan balas jasa dalam bentuk moneter yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja sebagai imbalan atas kontribusinya dalam proses produksi. Dalam perspektif ekonomi, upah dipandang sebagai harga atas jasa tenaga kerja yang terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja (Mankiw, 2009). Upah

juga merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar rumah tangga sehingga perubahan tingkat upah akan memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup serta tingkat kesejahteraannya (Ehrenberg & Smith, 2017).

2.3 Teori Dualisme Pasar Tenaga Kerja

Model dual sektor yang dikembangkan Lewis (1954) menjelaskan bahwa suatu perekonomian dapat terdiri dari dua sektor utama, yaitu sektor modern (*capitalist sector*) dan sektor tradisional (*subsistence sector*). Konsep dualisme tersebut kemudian berkembang menjadi dasar dalam menjelaskan segmentasi pasar tenaga kerja di negara berkembang, yaitu antara sektor formal dan sektor informal.

2.4 Teori Insider - Outsider

Teori Insider-Outsider yang dikembangkan oleh Assar Lindbeck dan Dennis J. Snower (1986, 1988) menjelaskan fenomena kekakuan upah (*wage rigidity*) dan segmentasi pasar tenaga kerja yang muncul akibat perbedaan posisi antara pekerja yang telah memiliki hubungan kerja (*insiders*) dan kelompok pekerja di luar hubungan kerja tersebut (*outsiders*).

2.5 Pengangguran dan Kaitannya terhadap Kemiskinan

Pengangguran merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tersedia untuk bekerja, dan sedang aktif mencari pekerjaan (ILO, 2013). Kondisi pengangguran menyebabkan hilangnya sumber pendapatan utama rumah tangga. Hal ini dikarenakan upah merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar rumah tangga pekerja sehingga hilangnya dana dari pendapatan tersebut mampu menurunkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan berpotensi menempatkan rumah tangga pada risiko jatuh ke bawah garis kemiskinan (Ehrenberg & Smith, 2017). Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar proporsi rumah tangga yang kehilangan sumber pendapatan sehingga risiko jatuh ke bawah garis kemiskinan juga meningkat.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan berupa data panel 34 provinsi selama periode 2017-2025, sehingga diperoleh 306 observasi, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel dependen penelitian adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independen utama adalah Kaitz Index yang dihitung dari rasio UMP terhadap rata-rata upah bersih pekerja/buruh. Model penelitian juga memasukkan persentase pekerja informal, interaksi Kaitz Index dengan pekerja informal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), log PDRB riil per kapita, serta dummy pandemi COVID-19 sebagai variabel kontrol. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) dan *cluster-robust standard errors* pada tingkat provinsi untuk mengatasi heteroskedastisitas dan korelasi serial. Pemilihan model dilakukan melalui pengujian model data panel, sedangkan multikolinearitas diuji menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan ketahanan hasil diuji melalui perubahan periode dummy COVID-19.

4. Hasil & Pembahasan

4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bagian penting dalam analisis data penelitian, yang berfungsi untuk meringkas, menyajikan, dan menginterpretasikan data secara jelas dan sistematis (Cooksey, 2020; Vetter, 2017).

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Observasi	Mean	Simpang Baku	Min	Max
POV	306	10.293	5.289	3.47	27.74
KI	306	0.942	0.185	0.465	1.487
INF	306	58.633	10.231	28.45	84.43
TPT	306	4.732	1.599	0.88	10.12
lnPDRB	306	10.546	0.552	9.381	12.264
DCovid	306	0.333	0.472	0	1

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, tingkat kemiskinan (POV) memiliki rata-rata sebesar 10,293 persen dengan simpangan baku 5,289 dan rentang 3,47-27,74 persen, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup besar antarprovinsi. Kaitz Index (KI) sebagai variabel independen utama memiliki rata-rata 0,942 dengan simpangan baku 0,185 serta rentang 0,465-1,487, yang menunjukkan adanya variasi posisi relatif UMP terhadap rata-rata upah pekerja antarprovinsi. Persentase pekerja informal (INF) memiliki rata-rata 58,633 persen dengan simpangan baku 10,231 dan berkisar antara 28,45-84,43 persen, menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja pada observasi penelitian bekerja di sektor informal dengan struktur pasar tenaga kerja yang berbeda antarprovinsi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki rata-rata 4,732 persen dengan simpangan baku 1,599 dan rentang 0,88-10,12 persen, sedangkan lnPDRB memiliki rata-rata 10,546 dengan simpangan baku 0,552 yang menunjukkan adanya perbedaan kapasitas ekonomi antarprovinsi meskipun variasinya relatif lebih kecil setelah transformasi logaritma. Sementara itu, variabel dummy COVID-19 memiliki rata-rata 0,333, yang menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari 306 observasi berada pada periode pandemi 2020-2022. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya variasi karakteristik sosial ekonomi antarprovinsi, sehingga analisis regresi data panel diperlukan untuk menguji pengaruh Kaitz Index terhadap tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan pekerja informal, TPT, kapasitas ekonomi daerah, dan pandemi COVID-19 sebagai variabel lainnya.

4.2 Hasil Estimasi Pemilihan Model Penelitian

Untuk menganalisis hubungan antara variabel independen, variabel kontrol, dan variabel dependen, penelitian ini menggunakan model regresi data panel.

4.2.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pada analisis regresi data panel, terdapat tiga pendekatan estimasi yang umum digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

4.2.1.1 Uji Chow

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

Uji Chow	Nilai
F-statistics	291.91
Prob > F	0.00
α	0.05
Model Terpilih	Fixed Effect Model (FEM)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.2, nilai probabilitas (Prob > F) dalam model ini adalah sebesar 0,0000, yang artinya lebih rendah dari tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga model terbaik yang lebih sesuai untuk dipilih dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

4.2.1.2 Uji Hausman

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) (Sianturi, 2025).

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

Uji Hausman	Nilai
Chi2	10.76
Prob > Chi2	0.096
α	0.05
Model Terpilih	Random Effect Model (REM)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.3, nilai probabilitas (Prob > Chi2) dalam model ini adalah sebesar 0,0000, yang artinya lebih tinggi dari tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga model terbaik yang lebih sesuai untuk dipilih dalam adalah Random Effect Model (REM).

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Setelah model regresi data panel yang sesuai diperoleh, tahap selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik.

4.3.1 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
Kaitz Index (centered)	2.84	0.352541
Informal (centered)	2.08	0.480344
Kaitz Index $\times$ Informalitas	1.48	0.677578
TPT	1.26	0.794652
Log PDRB per kapita	1.16	0.862511

Dummy COVID-19	1.08	0.929704
Mean VIF	1.65	

hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.4, seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dengan *mean VIF* sebesar 1,65. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, artinya model penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas sehingga tidak diperlukan penanganan lebih lanjut terhadap hubungan linear antarvariabel independen.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Modified Wald test	Hasil
Prob > Chi2	0.0000

Berdasarkan hasil uji yang tertera pada Tabel 4.5, nilai probabilitas (Prob > Chi2) dalam model ini adalah sebesar 0,0000, yang artinya sama dengan kurang dari tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga artinya terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

4.3.3 Uji Otokorelasi

Tabel 4.6 Hasil Uji Otokorelasi

Wooldridge test	Hasil
Prob > F	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian otokorelasi yang disajikan pada Tabel 4.6, diperoleh nilai probabilitas (Prob > F) sebesar 0,0000, yang artinya sama dengan kurang dari tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga terdapat masalah otokorelasi dalam model ini.

4.3.4 Penanganan Asumsi Klasik dengan Cluster Robust Standard Error

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dan uji otokorelasi pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa model penelitian mengalami masalah heteroskedastisitas dan otokorelasi. Kondisi tersebut tidak menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi bias, namun dapat menghasilkan standar error yang tidak konsisten sehingga pengujian signifikansi, seperti uji *t* dan uji *F*, menjadi kurang reliabel (Gujarati, 2009). Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap estimasi standar error agar inferensi statistik yang dihasilkan tetap valid. Dalam penelitian ini, penyesuaian tersebut dilakukan menggunakan cluster-robust standard errors pada tingkat provinsi (*clustered by province*). Pendekatan ini memungkinkan adanya heteroskedastisitas serta korelasi residual antarwaktu dalam provinsi yang sama, sehingga menghasilkan standar error yang tetap konsisten dan inferensi statistik yang lebih reliabel meskipun asumsi homoskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi tidak sepenuhnya terpenuhi (Wooldridge, 2010).

4.4 Hasil Estimasi Model

Tabel 4.7 Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM) dengan Clustered-Robust Standard Errors

Variabel	Koefisien	Std. Error	t	p> t
Kaitz Index (centered)	-4.088***	0.809	-5.05	0.000
Informal (centered)	0.191***	0.065	2.93	0.006
Kaitz Index x Informal	-0.120*	0.062	-1.94	0.061
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0.163	0.098	1.67	0.105
Log PDRB per kapita	-2.175**	0.967	-2.25	0.031
Dummy COVID-19	-0.316**	0.151	-2.09	0.044
Within R ²	0.5996			
F-statistic	23.68			
Prob > F	0.0000			
Observasi	306			

Keterangan: ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.10

Berdasarkan Tabel 4.7, hasil analisis regresi menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan clustered-robust standard errors menunjukkan bahwa sebagian besar variabel dalam model penelitian berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tingkat signifikansi yang berbeda. Berikut merupakan interpretasi lebih lanjut beserta koefisien dari masing-masing variabel dalam model:

1. Nilai konstanta sebesar 32,630 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dalam model dianggap bernilai nol, maka rata-rata tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 32,630 persen.
2. Koefisien Kaitz Index (centered) sebesar -4,088, artinya setiap kenaikan variabel kaitz index sebesar 1 poin indeks maka diperkirakan akan menurunkan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 4,088 poin persentase, ketika tingkat pekerja informal berada pada nilai rata-ratanya, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
3. Koefisien tingkat pekerja informal (centered) sebesar 0,191, artinya setiap kenaikan tingkat pekerja informal sebesar 1 poin persentase maka diperkirakan akan menaikkan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 0,191 poin persentase, ketika Kaitz Index berada pada nilai rata-ratanya, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
4. Koefisien interaksi antara Kaitz Index dan tingkat pekerja informal sebesar -0,120. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat pekerja informal sebesar 1 poin persentase menyebabkan pengaruh Kaitz Index terhadap rata-rata tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,120 poin, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
5. Koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,163, artinya setiap kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 poin persentase maka diperkirakan akan menaikkan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 0,163 poin persentase, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Namun demikian, koefisien tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10 persen.

6. Koefisien PDRB riil per kapita ($\ln PDRB$) sebesar -2,175, artinya setiap kenaikan PDRB riil per kapita sebesar 1 persen, maka diperkirakan akan menurunkan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 0,022 poin persentase, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
7. Koefisien *dummy* pandemi COVID-19 sebesar -0,316, artinya rata-rata tingkat kemiskinan pada periode pandemi (2020-2022) berada sekitar 0,316 poin persentase lebih rendah dibandingkan periode di luar pandemi (2017-2019 dan 2023-2025), dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan model yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap model regresi menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan clustered-robust standard errors yang meliputi uji signifikansi parsial (uji t), uji signifikansi simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Berikut merupakan hasil dari pengujian tersebut:

4.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengambilan keputusan dalam penelitian ini didasarkan pada nilai probabilitas (*p-value*) hasil estimasi regresi.

Tabel 4.8 Hasil Uji T

Variabel	Koefisien	P-value (two tail)	P-value (one tail)
Kaitz Index (centered)	4.088***	0.000	0.0000
Informal (centered)	0.191***	0.006	0.0030
Kaitz Index x Informal	-0.120**	0.061	0.0305
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0.163*	0.105	0.0525
Log PDRB per kapita	-2.175**	0.031	0.0155
Dummy COVID-19	-0.316**	0.044	0.0220

Keterangan: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.8, variabel Kaitz Index berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat signifikansi 1 persen. Variabel tingkat pekerja informal berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen. Variabel interaksi antara Kaitz Index dan tingkat pekerja informal berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Sementara itu, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 10 persen. Variabel log PDRB riil per kapita berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Variabel dummy pandemi COVID-19 berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen.

4.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis nol dalam pengujian ini menyatakan bahwa seluruh koefisien variabel independen secara bersama-sama sama dengan nol. Apabila nilai Prob > F lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, maka hipotesis nol ditolak sehingga seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.7, diperoleh nilai F-statistic sebesar 23,68 dengan nilai Prob > F sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, sehingga hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, variabel Kaitz Index, tingkat pekerja informal, interaksi antara Kaitz Index dan tingkat pekerja informal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), PDRB riil per kapita, dan dummy pandemi COVID-19 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini, ukuran koefisien determinasi yang digunakan adalah Within R^2 karena model yang digunakan merupakan Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.7, diperoleh nilai Within R^2 sebesar 0,5996. Artinya, sebesar 59,96 persen variasi tingkat kemiskinan antarwaktu dalam masing-masing provinsi selama periode penelitian dapat dijelaskan oleh variabel Kaitz Index, tingkat pekerja informal, interaksi antara Kaitz Index dan tingkat pekerja informal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), PDRB riil per kapita, dan dummy pandemi COVID-19. Sementara itu, sebesar 40,04 persen variasi tingkat kemiskinan dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

4.6 Robustness Check

Untuk menguji ketahanan (*robustness*) hasil estimasi, penelitian ini melakukan estimasi ulang dengan merubah definisi dari periode pandemi COVID-19 yang semula memuat 2020-2022 menjadi 2020-2021 dari sampel penelitian dengan jumlah observasi yang tetap sama yaitu 36. Langkah ini dilakukan sebagai uji sensitivitas untuk memastikan bahwa hasil utama penelitian, khususnya pengaruh Kaitz Index dan interaksinya dengan tingkat informalitas, tidak bergantung pada batas tahun spesifik yang digunakan untuk mendefinisikan periode pandemi.

Tabel 4.9 Hasil Uji *Robustness* Analisis Regresi Fixed Effects Model Utama dan Model Alternatif

Variabel	Model Utama (Dummy COVID 2020-2022)	Model Alternatif (Dummy COVID 2020-2021)
Kaitz Index (centered)	4,0876***	-4,2637***
Informal (centered)	0,1905***	0,1766***
Kaitz Index x Informal	-0,1196*	-0,1262**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0,1635	0,1148
Log PDRB per kapita	-2,1751**	-2,0717**
Dummy COVID-19	-0,3159**	-0,2007
Observasi	306	306

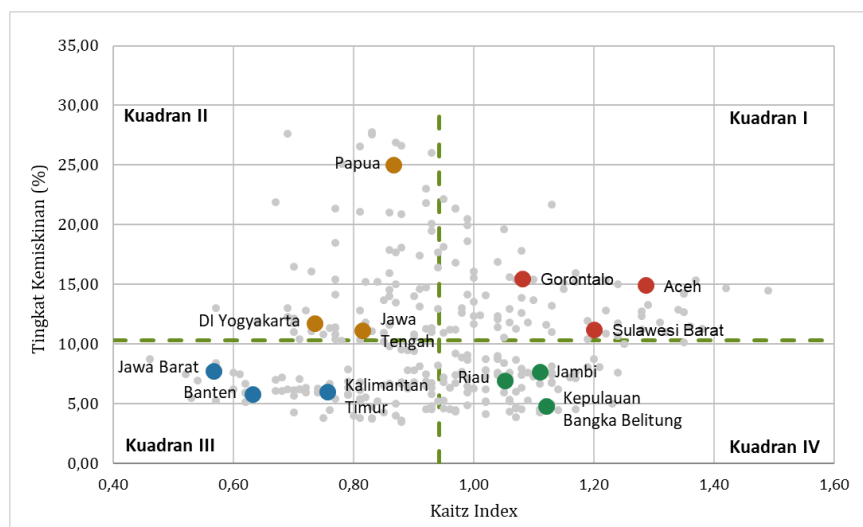
Keterangan: ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.10

Hasil *robustness check* menunjukkan bahwa Kaitz Index dan persentase pekerja informal tetap berpengaruh signifikan pada taraf 1% pada model alternatif, dengan arah koefisien yang konsisten dengan model utama. Interaksi antara Kaitz Index dan informalitas juga tetap berarah negatif dan mengalami penguatan signifikansi dari 10% pada model utama menjadi 5% pada

model alternatif, meskipun arah tersebut berlawanan dengan hipotesis awal. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka tetap tidak signifikan pada kedua model, sedangkan dummy COVID-19 kehilangan signifikansi ketika periode pandemi dibatasi pada 2020-2021. Secara keseluruhan, konsistensi arah dan signifikansi variabel utama menunjukkan bahwa hasil estimasi Kaitz Index dan interaksinya dengan informalitas relatif robust terhadap perubahan definisi periode pandemi.

4.7 Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effects Model* pada Tabel 3.7 Kaitz Index sebagai variabel utama berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 1% terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap rata-rata upah pekerja, semakin besar keterikatan (*minimum wage bite*) kebijakan upah minimum terhadap struktur upah. Peningkatan keterikatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah dan pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pada pasar tenaga kerja yang tidak sepenuhnya kompetitif, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja tanpa selalu menyebabkan penurunan kesempatan kerja yang besar. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Bird dan Manning (2008), Saget (2001), serta Merdikawati dan Al Izzati (2025) mengenai hubungan kebijakan upah minimum dengan kemiskinan.



Grafik 4.1 Hubungan Kaitz Index dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 2017-2025

Pola hubungan Kaitz Index dan tingkat kemiskinan antarprovinsi dapat dilihat berdasarkan pengelompokan menggunakan rata-rata Kaitz Index sebesar 0,942 dan rata-rata kemiskinan sebesar 10,293 persen. Provinsi dengan Kaitz Index tinggi dan kemiskinan tinggi antara lain Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, yang memiliki rata-rata pekerja informal sebesar 64,99 persen. Sebaliknya, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, dan Riau memiliki Kaitz Index tinggi dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah serta rata-rata informalitas sebesar 54,20 persen. Pola yang serupa terlihat pada provinsi dengan Kaitz Index rendah, di mana kelompok dengan kemiskinan rendah seperti Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur memiliki informalitas lebih rendah, sedangkan DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Papua yang memiliki kemiskinan lebih tinggi menunjukkan informalitas yang relatif lebih besar. Pola tersebut memberikan gambaran awal bahwa struktur pasar tenaga kerja turut berkaitan dengan perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi.

Persentase pekerja informal berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 1% terhadap tingkat kemiskinan. Tingginya informalitas menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja berada di luar cakupan langsung regulasi upah minimum dan cenderung memiliki produktivitas serta perlindungan kerja yang lebih rendah, sehingga lebih rentan terhadap kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan teori dualisme pasar tenaga kerja Lewis (1954) dan Fields (2004; 2012), serta penelitian Hohberg dan Lay (2015) dan Hapsari et al. (2023) yang menunjukkan adanya keterkaitan antara informalitas dan kemiskinan.

Variabel interaksi Kaitz Index dan informalitas memiliki koefisien sebesar -0,120 dan signifikan pada taraf 10%. Koefisien negatif menunjukkan bahwa pada wilayah dengan tingkat informalitas yang lebih tinggi, hubungan negatif Kaitz Index terhadap kemiskinan justru semakin kuat. Hasil ini berlawanan dengan dugaan awal bahwa informalitas akan melemahkan efektivitas kebijakan UMP karena pekerja informal tidak tercakup secara langsung dalam regulasi upah minimum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara upah minimum, informalitas, dan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui cakupan pekerja formal dan informal, tetapi kemungkinan juga berkaitan dengan mekanisme tidak langsung, seperti *spillover* upah dan perubahan daya beli rumah tangga. Dengan demikian, hasil interaksi menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara kebijakan upah minimum dan struktur pasar tenaga kerja.

Pada variabel makroekonomi, TPT berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 10%, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran berkaitan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan karena berkurangnya kesempatan masyarakat memperoleh pendapatan. Sebaliknya, lnPDRB berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5%, yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi daerah berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu, dummy COVID-19 berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% pada model utama. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan selama periode 2020-2022 setelah variabel lain dikendalikan, yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan berbagai kebijakan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi selama pandemi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kaitz Index berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, sementara efektivitasnya berkaitan dengan karakteristik pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi daerah. Informalitas memiliki hubungan positif dengan kemiskinan, sedangkan interaksi Kaitz Index dan informalitas menunjukkan arah negatif yang tidak sesuai dengan hipotesis awal. Selain itu, kapasitas ekonomi daerah berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, sedangkan pengangguran berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kebijakan upah minimum dan kemiskinan perlu dilihat bersama dengan struktur pasar tenaga kerja dan kondisi sosial ekonomi masing-masing provinsi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan Fixed Effect Model (FEM), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang diproses melalui Kaitz Index, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi posisi UMP relatif terhadap rata-rata upah pekerja, semakin besar potensi kebijakan tersebut dalam meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah, sehingga kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar meningkat dan tingkat kemiskinan cenderung menurun.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan UMP tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik pasar tenaga kerja. Persentase tenaga kerja informal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tingkat kemiskinan, yang menunjukkan bahwa semakin besar proporsi pekerja informal, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan, karena pekerja informal umumnya berada di luar cakupan perlindungan kebijakan upah minimum. Hal ini turut dikonfirmasi secara deskriptif, di mana provinsi seperti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Barat yang memiliki Kaitz Index tinggi namun tingkat kemiskinan tetap tinggi juga menunjukkan rata-rata informalitas yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Lebih lanjut, hasil uji interaksi antara Kaitz Index dan persentase tenaga kerja informal menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, yang berarti pengaruh Kaitz Index dalam menurunkan kemiskinan justru semakin kuat pada wilayah dengan informalitas tinggi. Temuan ini berlawanan dengan dugaan awal berdasarkan teori insider-outsider, dan mengindikasikan bahwa hubungan antara kebijakan upah minimum, informalitas, dan kemiskinan bersifat lebih kompleks.

Selain kondisi pasar tenaga kerja, kondisi makroekonomi turut berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, menunjukkan bahwa meningkatnya pengangguran memperbesar risiko rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, PDRB riil per kapita berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi daerah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dummy pandemi COVID-19 menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan setelah memperhitungkan variabel-variabel lain dalam model, yang mengindikasikan bahwa penurunan tingkat kemiskinan selama periode tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi pemerintah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Upah Minimum Provinsi dapat menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pengurangan kemiskinan di Indonesia, namun efektivitasnya bergantung pada struktur pasar tenaga kerja, khususnya tingkat informalitas, serta kondisi ekonomi daerah secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, R. V., Nurjanah, S., & Nikensari, S. I. (2024). The effect of inflation, minimum wage, labor absorption and the COVID-19 pandemic on poverty in Indonesia. *Finance: International Journal of Management Finance*, 1(4), 43-48. <https://doi.org/10.62017/finance.v1i4.47>
- Anwar, M. Z., Aida, N., & Taher, A. R. Y. (2025). The effect of open unemployment and education on poverty in Indonesia. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 3(4), 1384-1393. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v3i4.556>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Konsep dan definisi kemiskinan*. Badan Pusat Statistik
- Belser, P., & Rani, U. (2015). *Minimum wages and inequality*. International Labour Organization.
- Bird, K., & Manning, C. (2008). Minimum wages and poverty in a developing country: Simulations from Indonesia's household survey. *World Development*, 36(5), 916-933. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.05.012>
- Borjas, G. J. (2020). *Labor economics* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Cooksey, R. W. (2020). Descriptive statistics for summarising data. In *Illustrating statistical procedures: Finding meaning in quantitative data* (pp. 61-139). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2537-7_5
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195-225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>

- Fields, G. S. (2004). Dualism in the labor market: A perspective on the Lewis model after half a century. *The Manchester School*, 72(6), 724-735. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2004.00429.x>
- Fields, G. S. (2012). *Working hard, working poor: A global journey*. Oxford University Press.
- Godoy, A., & Reich, M. (2021). Are minimum wage effects greater in low-wage areas? *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 60(1), 36-83. <https://doi.org/10.1111/irel.12267>
- Herrero Olarte, S. (2021). Is the minimum wage effective in a context of informality? *Applied Economics Letters*, 28(12), 1041-1044. <https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1793925>
- Hohberg, M., & Lay, J. (2015). The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: Evidence from Indonesia. *IZA Journal of Labor & Development*, 4(1), Article 15. <https://doi.org/10.1186/s40175-015-0036-4>
- International Labour Organization. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). International Labour Organization.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2017). Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2018.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Mankiw, N. G. (2009). *Principles of economics* (5th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Merdikawati, N., & Al Izzati, R. (2025). Minimum wage policy and poverty in Indonesia. *The World Bank Economic Review*, 39(1), 191-210. <https://doi.org/10.1093/wber/lhae022>
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146.
- Ronconi, L., Kanbur, R., & López-Cariboni, S. (2023). Who demands labour (de)regulation in the developing world? Revisiting the insider-outsider theory. *International Labour Review*, 162(2), 223-243. <https://doi.org/10.1111/ilr.12363>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the impact of COVID-19 on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175-192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Vetter, T. R. (2017). Descriptive statistics: Reporting the answers to the 5 basic questions of who, what, why, when, where, and a sixth, so what. *Anesthesia & Analgesia*, 125(5), 1797-1802. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002471>